

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bergesernya sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, dan berlakunya otonomi daerah, mengakibatkan daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus secara mandiri urusan pemerintahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, kepada daerah diberikan wewenang yang luas, demikian pula dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan kewenangan tersebut. Akibat dari pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana tersebut, tentu ada kebutuhan akan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pertanggungjawaban tersebut meliputi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif sebagai bentuk pertanggungjawabannya yang tentunya harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah pemerintahan yang diselenggarakan sudah berjalan dengan baik, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Meninjau dari pentingnya laporan keuangan tersebut maka laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh pemerintah daerah harus berkualitas.

Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah digunakan oleh berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Informasi dalam laporan keuangan tersebut digunakan oleh berbagai pihak sebagai dasar dalam mengambil suatu keputusan. Keputusan yang diambil tersebut dapat berkaitan dengan keputusan sosial, ekonomi maupun politik. Informasi dalam laporan keuangan tidak boleh berisikan informasi yang menyesatkan, karena dapat berakibat terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan oleh para pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu kualitas laporan keuangan harus diperhatikan untuk menghindari adanya kesalahan informasi dalam laporan keuangan (Mahmudi, 2016).

Laporan keuangan dikatakan berkualitas adalah jika memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut diungkapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Karakteristik relevan artinya pemerintah harus menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu, lengkap, memiliki manfaat prediktif dan memiliki manfaat umpan balik, sebab jika pemerintah terlambat dan kurang dalam menyajikan laporan keuangan akan menyebabkan manfaat informasi laporan keuangan berkurang. Oleh karena itu perlu adanya teknologi informasi dan sumber daya manusia yang berkompeten agar laporan keuangan yang disajikan dapat tepat pada waktu laporan keuangan tersebut dibutuhkan. Karakteristik andal artinya pemerintah harus menyajikan laporan keuangan secara jujur, netral dan dapat diverifikasi. Dalam menerapkan

karakteristik andal pemerintah memerlukan penerapan sistem pengendalian intern dan peran audit internal yang baik agar dapat meminimalisir kesalahan maupun penyimpangan dalam mengelola keuangan daerah. Karakteristik dapat dibandingkan artinya laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya dan dengan entitas lain yang sejenis, sedangkan karakteristik dapat dipahami artinya laporan keuangan harus disajikan dengan jelas agar mudah untuk dipahami. Untuk memenuhi karakteristik dapat dibandingkan dan dipahami pemerintah perlu menyusun laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber daya manusia berperan dalam mengelola data akuntansi hingga menyajikan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang berkualitas tidak lepas dari sumber daya manusia yang berkompeten yang dimiliki oleh organisasi publik tersebut. Menurut Setyowati et al., (2016) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang dimaksud di sini adalah kemampuan sumber daya manusia melaksanakan tugasnya sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki dari bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang didapatkan sebelumnya. Sumber daya manusia yang berkompeten lebih mudah memahami akuntansi dengan baik dalam hal pengakuan, pengklasifikasian maupun pengukuran, karena telah memiliki bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman, sehingga dalam menjalankan tugasnya dapat dilakukan secara akurat dan tepat waktu. Oleh karena itu laporan keuangan tersebut dapat dikatakan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan.

Faktor yang kedua yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah adanya teknologi informasi yang digunakan dalam mengelola keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi kepada pelayanan publik. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud disini adalah penggunaan komputer dan jaringan internet. Penggunaan komputer beserta dengan *softwarena* mampu mempercepat dalam pengelolaan keuangan daerah karena input, proses dan output dapat dilakukan dalam waktu yang cepat. Teknologi informasi lainnya adalah penggunaan internet, internet dapat membantu mempercepat dalam mengirim data dari setiap SKPD ke BPPKAD serta mempermudah mempublikasikan informasi laporan keuangan dan informasi lainnya dari masing-masing pemerintah daerah. Oleh karena itu dapat dikatakan pemanfaatan teknologi informasi ini dapat mempercepat pengelolaan dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tepat waktu dan informasi laporan keuangan dapat digunakan tepat pada saat dibutuhkan, atau bisa disebut memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah penerapan sistem pengendalian intern pemerintah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan bahwa

sistem pengenalan intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai dan tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Dihubungkan dengan pemerintah daerah maka sistem pengendalian yang baik adalah dirancang dengan cara setiap bagian melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan tanggungjawabnya. Hal tersebut bertujuan untuk adanya pemisahan fungsi, sehingga dapat terjadi saling kontrol atau saling cek dari satu bagian dengan bagian lain, antara data yang dicatat dengan yang disimpan. Adanya saling cek tersebut maka saat ditemukan kesalahan data dapat dideteksi lebih awal dan dilakukan perbaikan secepat mungkin. Berbeda saat satu bagian melaksanakan berbagai fungsi maka tidak terjadi saling cek, sehingga data yang terjadi kesalahan tidak dapat dideteksi lebih awal. Oleh karena itu dengan diterapkannya sistem pengendalian intern yang baik, data dapat diverifikasi kebenarannya karena terjadi saling cek berkaitan dengan kejujuran penyajiannya, sehingga dapat dikatakan laporan keuangan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu andal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 inspektorat bertugas untuk menentukan keterandalan informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dengan cara melakukan reviu. Keterandalan laporan keuangan yang dimaksud di sini adalah berarti laporan keuangan disajikan secara jujur, netral dan dapat diverifikasi. Apabila saat dilakukan review oleh inspektorat, menemukan suatu kecurangan,

kesalahan maupun penyimpangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku, maka inspektorat akan memberitahukan hal tersebut kepada entitas yang direviu atau biasa disebut dengan memberikan rekomendasi. Rekomendasi tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh entitas yang direviu untuk kemudian melakukan perbaikan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan nantinya memenuhi karakteristik andal karena telah dilakukan perbaikan terhadap kesalahan yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku.

Berdasarkan permasalahan diatas, menarik peneliti untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan mengambil judul **PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Grobogan).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Penerapan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
4. Apakah Peran Audit Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut ini:

1. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Untuk menganalisis dan memberikan bukti empiris pengaruh Peran Audit Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak yang

memerlukan, termasuk dari pihak Kabupaten Grobogan dan publik sebagai pembacanya, adapun manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya yaitu berkaitan dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Pengendalian Intern, Peran Audit Internal dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan referensi untuk penelitian di bidang akuntansi, serta dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan ilmu akuntansi khususnya akuntansi pemerintahan dan dapat menjadi media informasi untuk peneliti lebih lanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini merupakan penerapan dari teori yang telah diterima selama kuliah. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan antara teori yang diterima dan hasil nyata yang telah diteliti.
- b. Bagi BPPKAD pemerintah daerah kabupaten Grobogan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan sumber pertimbangan untuk menilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian



intern dan peran audit internal terhadap kualitas laporan keuangan, yang nantinya dapat digunakan untuk bahan evaluasi bagi pemerintah daerah Kabupaten Grobogan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Grobogan di masa yang akan datang.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang mendasari munculnya permasalahan dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi dasar acuan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

##### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai metode penelitian yang menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi operasional, metode penelitian, metode pengambilan sampel, jenis data yang digunakan beserta sumbernya, teknik pengambilan data dan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis hasil pengujian sampel.

#### BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian pembahasan, yang berisi tentang pengujian atau hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan dengan teori yang berlaku.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup, yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya secara singkat. Dalam bab ini juga dimuat keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian berikutnya.